

## **VISI PEMBANGUNAN PULAU JAWA PADA ABAD KE-21**

**Oleh:**  
**Ginandjar Kartasasmita**  
**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan pada Konvensi Nasional Masa Depan Pulau Jawa Abad Ke -21  
yang diselenggarakan bersama oleh CIDES, INKINDO, dan PPM  
Jakarta, 29 Oktober 1996**

Saya merasa berbahagia memperoleh kesempatan menghadiri Konvensi Nasional Masa Depan Pulau Jawa Abad Ke-21 yang diselenggarakan bersama oleh CIDES, INKINDO, dan PPM, untuk membahas sebuah topik yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan negara kita, yakni masa depan Pulau Jawa pada Abad ke-21 dalam era transparansi global dengan segala aspeknya.

Bersamaan dengan konvensi ini, diresmikan pula Forum Komunikasi Tata Ruang dan Pertanahan Nasional, dimana CIDES menjadi salah satu pemrakarsanya. Forum ini akan merupakan sebuah lembaga masyarakat yang akan membahas secara independen dan obyektif masalah-masalah tata ruang dan pertanahan, sehingga akan sangat membantu Pemerintah dalam menyiapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ini. Di samping itu juga akan membantu masyarakat untuk berperanserta aktif dalam penataan ruang sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Dalam mengupas peranan Pulau Jawa pada abad ke-21 mendatang, kita tidak dapat terlepas dari peran historis Pulau Jawa. Pulau Jawa jelas besar perannya dalam kehidupan bangsa sejak perjuangan kemerdekaan sampai pada masa pembangunan nasional dewasa ini.

Di Pulau Jawa ini berada pusat pemerintahan, yang merupakan pusat kegiatan politik dan administrasi negara. Di Pulau Jawa terkonsentrasi sumber daya manusia Indonesia. Penduduknya, menurut data sensus tahun 1990, berjumlah sekitar 107,58 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari penduduk Indonesia. Menurut perkiraan Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1995 penduduk Jawa sudah meningkat lagi menjadi sekitar 115 juta jiwa. Di wilayah ini, fasilitas pendidikannya paling luas dan beragam. Pada tahun 1993, sekitar 51 persen SD dan 58 persen guru sekolah dasar (SD) berada di Pulau Jawa. Di tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekitar 48 persen sekolah dan 54 persen guru SLTP berada di Pulau Jawa. Di tingkat sekolah menengah umum (SMU), sekitar 50 persen sekolah dan 53 persen guru SMU berada di wilayah ini. Demikian pula di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), Pulau Jawa menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dasar dan terapan. Dewasa ini, 56 persen perguruan tinggi berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 perguruan tinggi negeri, atau 45 persen. Mahasiswa yang ditampung dalam perguruan tinggi di Pulau Jawa adalah 66,6 persen dari total mahasiswa Indonesia. Jumlah tenaga pengajar yang dimiliki lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Jawa adalah 58,0 persen dari seluruh tenaga pengajar perguruan tinggi di Indonesia.

Penduduk Pulau Jawa memiliki derajat kesehatan yang paling baik dibandingkan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh kenyataan bahwa pada tahun 1990 angka rata-rata kematian bayi di Pulau Jawa lebih kecil 22,1 persen daripada angka rata-rata kematian bayi wilayah lain dan 17,9 persen lebih kecil daripada angka kematian bayi nasional. Sementara itu, angka rata-rata harapan hidup penduduk Pulau Jawa lebih tinggi 5,1 persen dari angka rata-rata harapan hidup penduduk daerah lain dan 4,1 persen lebih tinggi daripada angka harapan hidup nasional.

Sejak zaman kolonial memang Pulau Jawa-lah yang terlebih dahulu dibangun, oleh karena kehidupan budayanya memang telah cukup berkembang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih maju. Misalnya, lebih dari 1000 tahun yang lalu di Pulau Jawa telah dibangun karya teknologi dan seni yang hebat untuk ukuran dunia, yakni Candi Borobudur. Aspek itu ditambah dengan kenyataan bahwa Pulau Jawa tanahnya sangat subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, yang sebelum revolusi industri menjadi kegiatan yang paling utama. Infrastruktur lebih dahulu dikembangkan untuk Pulau Jawa dalam menunjang berbagai kegiatan ekonomi. Industri juga berkembang lebih pesat di Jawa, yang pada awalnya adalah untuk menunjang kegiatan perkebunan besar.

Dewasa ini, 59,3 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi Pulau Jawa. Sektor industri di Pulau Jawa menyumbang 67,4 persen dari keseluruhan nilai tambah industri nasional. Jumlah perusahaan industri manufaktur di Pulau Jawa adalah 79,3 persen dari seluruh Indonesia. Pada tahun 1995, pangsa ekspor sektor industri manufaktur Pulau Jawa ini mencapai sekitar 70 persen dari ekspor hasil industri manufaktur nasional.

Di bidang pertanian pada tahun 1994, 47,4 persen nilai tambah di sektor pertanian bersumber di Pulau Jawa. Pada tahun 1993 jumlah rumah tangga petani di Pulau Jawa sekitar 11,8 juta adalah 54,5 persen dari seluruh rumah tangga petani di Indonesia, padahal luas lahan pertanian di Pulau Jawa adalah 31,8 persen dari seluruh lahan pertanian di Indonesia. Namun, dari luasan itu, 59,5 persen adalah lahan sawah beririgasi. Oleh karenanya rata-rata produksi padi per hektare di Pulau Jawa pada tahun 1993 adalah 5,13 ton, lebih tinggi dari semua wilayah Indonesia lainnya (produktivitas rata-rata per hektare di Indonesia pada tahun yang sama adalah 4,38 ton).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Pulau Jawa berpengaruh pula pada perubahan struktur dan pola penataan ruangnya. Di Pulau Jawa, perkotaan berkembang cepat, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa-jasa. Simpul-simpul produksi dan distribusi di Pulau Jawa telah berkembang menjadi kota-kota dengan segala fasilitasnya. Perkembangan pemanfaatan ruang di Pulau Jawa makin mengarah pada pertumbuhan kawasan perkotaan, perumahan dan permukiman, serta kegiatan industri di sepanjang jaringan infrastruktur wilayah, khususnya jalan raya, sehingga membentuk *'urban belt'* terutama di Pulau Jawa bagian utara. Pada tahun 1995 tercatat 442 kota-kota di Pulau Jawa yang merupakan sekitar 48 persen dari jumlah kota-kota secara nasional. Sekitar 41,9 persen penduduk pulau Jawa adalah penduduk perkotaan.

Proses transformasi struktural juga berawal di Pulau Jawa. Pada akhir Pelita I (tahun 1974) komposisi sumbangan sektor primer (pertanian dan pertambangan) dalam PDRB Pulau Jawa adalah 41,9 persen, sektor sekunder (industri, listrik, gas dan air bersih, serta bangunan) adalah 14,6 persen, dan sektor tersier (perdagangan pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa) adalah 43,5 persen. Pada awal Repelita VI (tahun 1994), sumbangan sektor primer hanya tinggal 17,0 persen, sektor sekunder meningkat menjadi 36,8 persen, dan sektor tersier meningkat menjadi 46,2 persen.

Berbagai hal di atas menjelaskan mengapa Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Namun, kemajuan itu bukan tanpa masalah. Masalah yang paling menonjol antara lain adalah penurunan kualitas lingkungan yang memprihatinkan, terutama di kawasan-kawasan yang tumbuh cepat seperti Pantai Utara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang-Jawa Barat dan Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Peningkatan kegiatan perkotaan yang pesat, yang di satu sisi telah banyak menyumbang bagi kemajuan ekonomi wilayah ini, di sisi lain juga banyak mengakibatkan masalah antara lain adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Diperkirakan sekitar 30.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi per tahun. Peningkatan kegiatan perkotaan juga menyebabkan timbulnya masalah banjir laten terutama di kota-kota besar dan kemacetan lalu lintas yang rutin, serta tingginya kriminalitas dan ketegangan sosial akibat benturan berbagai kepentingan, antara lain yang menyangkut masalah penggunaan lahan. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain, juga telah mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air seperti areal-areal hutan dan situ-

situ akibat perambahan, yang pada gilirannya mengurangi kuantitas air baku untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi.

Data statistik kehutanan Indonesia menyebutkan bahwa sampai dengan bulan Maret 1993, luas hutan di Pulau Jawa adalah 3,01 juta hektare atau 2,7 persen dari luas hutan seluruh Indonesia. Dari luas tersebut, 555 ribu hektare adalah hutan lindung. Areal hutan lindung di Pulau Jawa tersebut hanya 4,2 persen dari luas lahan wilayahnya. Persentase luas hutan lindung di Pulau Jawa ini jauh lebih rendah dari persentase luas hutan lindung untuk seluruh luas lahan Indonesia, yang pada tahun 1993 adalah 15,4 persen dari luas lahan Indonesia.

Masalah kemiskinan juga menjadi sisi lain yang menyertai perkembangan ekonomi Pulau Jawa. Meskipun secara persentase lebih kecil, tetapi secara absolut penduduk miskin di Jawa lebih besar daripada di luar Jawa. Pada tahun 1993 penduduk miskin di Pulau Jawa berjumlah 14,5 juta jiwa (12,9 persen dari penduduk Jawa), sedangkan di luar Pulau Jawa 11,3 juta jiwa (14,7 persen dari penduduk luar Jawa).

Dalam keadaan demikian kita memikirkan bagaimana masa depan Pulau Jawa. Tentunya apa yang dapat kita lakukan semata-mata adalah membuat *exercise* untuk kepentingan akademis dan perencanaan.

Apabila kita melakukan ekstrapolasi berdasarkan kondisi sekarang dan kecenderungan-kecenderungannya, maka akan diperoleh perkiraan jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 2018 mencapai 139,7 juta jiwa dan tingkat pendapatannya rata-rata per kapita diperkirakan mencapai US\$4.000 menurut harga konstan 1993. Dengan besaran tersebut, Pulau Jawa akan merupakan pasar yang besar.

Jumlah penduduk di daerah perkotaannya mencapai 86,8 juta atau 60,5 persen dari total penduduk Pulau Jawa. Penduduk perkotaan tersebut akan tersebar di lebih dari 1.000 kota yang ada di wilayah ini. Peranan kota-kota di Pulau Jawa akan semakin dominan dalam pertumbuhan ekonomi, dimana lebih dari 75 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Jawa akan disumbang oleh daerah perkotaan. Meskipun masih tetap akan didominasi oleh kota-kota besar dan metropolitan, peranan kota menengah dan kecil di Pulau Jawa akan semakin penting, baik dalam sistem perkotaan maupun dalam peningkatan investasi swasta.

Bukan maksud kita untuk mengonsentrasikan pembangunan di Pulau Jawa saja, tetapi dengan ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia dan peranan administratif, Pulau Jawa masih tetap akan menjadi wilayah yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Selanjutnya, Pulau Jawa diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan perangsang bagi pembangunan di daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu, memang diperlukan upaya untuk menjaga momentum pembangunan di Pulau Jawa dengan tetap memprioritaskan percepatan pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di kawasan tertinggal seperti di kawasan timur Indonesia (KTI). Dalam rangka itu perlu ditingkatkan keterkaitan pembangunan (*development linkages*) antara Pulau Jawa dan pulau-pulau serta daerah-daerah yang lain untuk mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara Pulau Jawa dan daerah-daerah yang lain di luar Pulau Jawa.

Oleh karena itu, **visi dasar pertama** yang perlu dikembangkan dalam menyusun pembangunan Pulau Jawa pada masa mendatang adalah bagaimana pembangunan di Pulau Jawa dapat diarahkan untuk mengurangi, dan bukan memperlebar, kesenjangan, baik kesenjangan pertumbuhan antarwilayah, antarsektor maupun antaragolongan pendapatan. Visi pengurangan kesenjangan ini harus tercermin dalam langkah-langkah meningkatkan pemerataan pembangunan baik di Pulau Jawa sendiri maupun antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya di luar Pulau Jawa. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa ada kecenderungan melebar jika tidak ada intervensi yang tepat untuk memperkecil kesenjangan itu.

**Visi dasar kedua** yang perlu dikembangkan adalah berkaitan dengan upaya menempatkan Pulau Jawa dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan global dengan

persaingan yang semakin menajam. Abad ke-21 akan diwarnai dengan tuntutan-tuntutan efisiensi, produktivitas, kualitas, keterkaitan, keterbukaan, per saingan dunia, dan peranserta masyarakat.

Menghadapi tantangan itu, pembangunan di Pulau Jawa harus diarahkan pada peningkatan daya saing kegiatan ekonomi dan produk-produk unggulan dalam perekonomian dunia. Dengan kata lain, pembangunan di Pulau Jawa harus mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dan untuk itu dibutuhkan mekanisme yang transparan dengan dukungan peranserta dari semua pelaku (*stakeholders*) yang terlibat dalam pembangunan.

Hal ini berkaitan pula dengan keperluan untuk mengembangkan **visi dasar ketiga** yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, terutama dalam bentuk usaha kecil dan menengah serta koperasi yang harus berkembang dengan kuat. Hal ini ingin saya tekankan mengingat wilayah dan masyarakat Indonesia yang harus dibangun tidak hanya di Jawa saja. Dengan masyarakat serta ekonomi yang makin mantap dan mandiri maka dapat diharapkan bahwa pembangunan prasarana dan sarana dasar ekonomi di Jawa tidak lagi bergantung pada investasi pemerintah. Sumber dana pemerintah yang relatif akan terus terbatas dapat lebih dioptimalkan bagi pembangunan di luar Jawa. Saya justru berpendapat bahwa Jawa di masa yang akan datang harus menjadi pelopor bagi pembangunan yang dimotori oleh peran serta masyarakat, baik untuk pulau ini sendiri maupun untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya ingin menekankan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di semua wilayah pembangunan, khususnya di Pulau Jawa. Masyarakat di Pulau Jawa merupakan masyarakat yang secara relatif mempunyai tingkat kemampuan ekonomis dan keberdayaan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa. Dengan tingkat kemampuan ekonomis dan kesadaran serta tanggung jawab sosial yang lebih tinggi itu, maka tuntutan untuk memperoleh pelayanan sosial menjadi lebih tinggi pula sejalan dengan tuntutan untuk berperanserta dalam seluruh proses pembangunan mulai dari tahap perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian pelaksanaannya.

Dengan kesejahteraan yang makin meningkat, maka tuntutan-tuntutan pun makin tinggi baik intensitas maupun kualitasnya. Pemenuhan tuntutan bagi masyarakat di Pulau Jawa bukan saja semata-mata sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), tetapi sudah lebih tinggi, lebih canggih dan bervariasi.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Pulau Jawa perlu diarahkan untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang pada era global melalui penumbuhan iklim yang merangsang, didukung oleh perangkat-perangkat hukum serta kelembagaan dan sumber daya manusia yang handal.

Pengurangan kesenjangan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat merupakan visi-visi dasar dalam mengisi peran Pulau Jawa sebagai pendorong pembangunan nasional pada abad ke-21 mendatang.

Memperhatikan kecenderungan perkembangan ekonomi dan struktur tata ruang di Pulau Jawa seperti disebutkan di atas, maka Pulau Jawa mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang berwawasan pemerataan dan meningkatkan daya saing nasional dalam proses globalisasi ekonomi melalui peranserta masyarakat.

**Pertama**, Pulau Jawa yang mempunyai penduduk yang jumlahnya besar dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi akan menjadi pasar yang kuat bagi produk-produk yang dihasilkan bukan hanya di Jawa sendiri, tetapi juga di luar Pulau Jawa sehingga dapat berperan besar dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah di luar Pulau Jawa. Ini berarti bahwa pembangunan di luar Pulau Jawa dapat memanfaatkan perkembangan ekonomi di Pulau Jawa dan sekaligus membendung kecenderungan pemanfaatan Pulau Jawa sebagai tempat utama investasi.

Dengan proses tersebut, secara bertahap potensi pembangunan di luar Pulau Jawa makin terungkap dan terwujudkan. Dengan demikian, potensi tersebut dapat menggerakkan momentum

percepatan pertumbuhan yang akan memperkecil kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, dan pada saatnya menghilangkan kesenjangan itu sendiri.

**Kedua**, penduduk Pulau Jawa yang besar dan maju merupakan aset penting untuk mengembangkan industri dan jasa berteknologi tinggi yang dapat bersaing di pasar internasional. Penduduk Pulau Jawa pada tahun 2018 diharapkan sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan secara umum ini, kualitas tenaga kerja juga semakin meningkat. Berarti akan ada peningkatan produktivitas dalam seluruh proses produksi. Bagi Pulau Jawa peningkatan produktivitas diperlukan karena basis ekonominya akan makin bertumpu pada sektor sekunder dan tersier.

Pulau Jawa dapat berfungsi sebagai sumber jasa dan teknologi bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Sekurang-kurangnya pada tahap awal Pulau Jawa akan menjadi perantara bagi produk-produk daerah luar Pulau Jawa untuk masuk ke pasar dunia sebelum cukup kuat untuk langsung memasuki pasar internasional dan mengembangkan struktur ekonomi yang lebih maju dengan dukungan teknologi.

**Ketiga**, sistem kota-kota yang semakin terintegrasi di Pulau Jawa merupakan potensi yang besar dalam pengembangan keanekaragaman usaha yang dipicu oleh makin beranekaragamnya permintaan dan meningkatnya kemampuan produksi. Pengalaman Pulau Jawa dalam mengembangkan kota-kota termasuk sistem prasarana yang terpadu dapat digunakan untuk membangun sistem kota-kota di luar Pulau Jawa.

**Keempat**, tenaga kerja yang terampil dan lebih maju dalam profesinya akan menjadi aset yang penting baik bagi Pulau Jawa sendiri maupun bagi daerah di luar Pulau Jawa. Namun, dengan menurunnya peran sektor pertanian di Pulau Jawa, berarti akan tersedia tenaga kerja yang cukup terampil, banyak dan relatif murah untuk membantu pembangunan di luar Pulau Jawa. Apalagi lahan di Pulau Jawa sudah semakin terbatas. Sekarang saja, kegiatan perkebunan, misalnya, sebagian besar sudah beralih ke luar Jawa. Secara bertahap kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan juga akan beralih ke luar Jawa, dengan mengembangkan lahan yang cocok untuk pertanian seperti di Kalimantan dan Irian Jaya yang masih belum cukup terjamah.

**Kelima**, dalam rangka meningkatkan daya saing di pasaran global pada abad ke-21, memasukkan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup merupakan aspek yang mendasar bagi pembangunan Pulau Jawa. Upaya ini akan menjadikan Pulau Jawa sumber pengetahuan baru dan kearifan dalam pembangunan yang akrab lingkungan yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan di luar Pulau Jawa dan bahkan di negara lain. Di Pulau Jawa diperlukan kebijaksanaan lingkungan yang komprehensif bagi peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam yang saat ini pemanfaatannya telah dekat dan bahkan ada yang telah melampaui batas ambang daya dukungnya. Areal-areal kawasan lindung perlu sungguh-sungguh dilindungi dan dicegah perambahannya. Di dalam kawasan budidaya pun, setiap kegiatan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pengurangan sumber daya alam. Khusus bagi kegiatan pertanian, pengembangannya di Pulau Jawa harus diarahkan pada pola kegiatan intensifikasi, bioteknologi, dan pengembangan tanaman komoditas yang bernilai tambah tinggi untuk mengompensasi tersedianya lahan yang memadai bagi ruang hijau terbuka. Kearifan lingkungan hidup ini akan berkembang sejalan dengan perkembangan sektor sekunder (industri manufaktur) dan sektor tersier (perdagangan dan jasa-jasa), serta kawasan andalan dalam pendekatan regional.

**Keenam**, Pulau Jawa yang menjadi ajang kehidupan berbagai suku bangsa dan agama, memiliki pengalaman unik dalam mengembangkan keserasian sosial dan budaya termasuk pengalaman mengembangkan demokrasi serta membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh. Pengalaman ini, akan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah lain dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi. Kepeloporan Pulau Jawa dalam hal ini, penting bagi pengembangan kualitas politik dan sosial budaya di tengah dinamika pembangunan yang intensif.

Sebagai penutup, saya mengharapkan konvensi ini dapat mengkaji berbagai hal di atas, serta merumuskan tata nilai, pandangan, dan prioritas yang ada dalam memandang pembangunan

Pulau Jawa dalam konteks pembangunan nasional, guna memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh Pulau Jawa pada waktu ini, dengan tujuan menciptakan pola pembangunan yang menjamin kemajuan, kemandirian, serta pemerataan sosial dan keadilan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita dalam upaya ini.